



LAPORAN BARANG PENGGUNA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEMESTER I TAHUN 2023



DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

Nomor : B/261/PL.02.05/VII/2023 Jakarta, 27 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Laporan Barang Pengguna
Semester I Tahun 2023 pada Setjen Wantannas

Yth. Dirjen Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI

di
Tempat

u.p. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-82/KN/KN.2/2023 tanggal 4 Juli 2023 perihal Penyampaian Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2023 pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Umum selaku
Kuasa Pengguna Barang,
Spendi, S.T., M.Tr.Opsla.
Laksamana Pertama TNI

Tembusan:
Sesjen Wantannas (sebagai laporan).

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah salah satu entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan proses akuntansi dan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas aset barang milik negara dengan menyusun Laporan Barang Pengguna dengan Catatan Laporan Barang Milik Negara.

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2023 ini disusun pada periode awal Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Tahun 2023 adalah kedua Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN dalam melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Penggunaan Aplikasi SAKTI merupakan sebuah terobosan dalam pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan Barang Milik Negara yang telah mengintegrasikan fungsi-fungsi utama pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Disamping itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, 27 Juli 2023

Kuasa Pengguna Barang,

Supendi, ST, M.Tr. Opsla
Laksamana Pertama TNI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	III
Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara	1
I. Pendahuluan	1
A. Dasar Hukum	2
B. Entitas Pelaporan	3
II. Kebijakan Penatausahaan BMN	4
1. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang	5
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)	6
3. Kebijakan Kapitalisasi BMN	7
4. Rekonsiliasi nilai BMN	7
5. Penyusutan BMN	8
III. Pendekatan Penyusunan Laporan	8
IV. Ringkasan Barang Milik Negara	9
1. Saldo Awal BMN Tahun 2023	9
2. Ringkasan Mutasi BMN Tahun 2022	10
3. BMN pada LBP Setjen Wantannas Per 30 Juni 2023	15
V. Informasi Lainnya	17
1. Perkembangan Nilai BMN	17
2. Informasi Pengelolaan BMN	17
3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan	19
4. BMN pada satuan kerja BLU	19
5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain	19
6. Informasi terkait BMN	19

EXECUTIVE SUMMARY

Setjen Wantannas sebagai salah satu K/L pengguna barang yang wajib menyusun Laporan Barang Pengguna baik Semesteran maupun tahunan berupa neraca, laporan BMN, dan catatan atas laporan BMN. Sementara itu laporan ini adalah Laporan Barang Pengguna (LBP) Semester I Tahun 2023, dimana penyusunannya dilakukan pada periode awal tahun 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

1. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023, dalam hal ini neraca yang disajikan merupakan neraca BMN yang terdiri atas Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Nilai BMN Intrakomptabel per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 156.081.227.441, untuk nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp 64.481.000, dan nilai persediaan sebesar Rp 456.210.

Ringkasan Neraca atas BMN per 30 Juni 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

	Saldo Awal	Saldo Akhir
Aset Lancar-Persediaan	531.690	456.210
Aset Tetap	156.051.327.441	156.081.227.441
Aset Tetap Lainnya	568.097.704	568.097.704
Total	156.619.956.835	156.649.781.355

2. LAPORAN BMN

Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Semester I Tahun 2023 merupakan laporan yang menggambarkan posisi BMN pada tanggal 30 Juni 2023. Laporan BMN ini disajikan berdasarkan kelompok barang baik untuk intrakomptabel maupun ekstrakomptabel. Nilai Laporan BMN Intrakomptabel merupakan nilai BMN yang nilai perolehannya memenuhi batas kapitalisasi dan disajikan pada neraca yaitu sebesar Rp 156.081.227.441 sementara nilai laporan BMN Ekstrakomptabel merupakan nilai BMN yang perolehannya di bawah batas nilai kapitalisasi BMN, untuk posisi 30 Juni 2023 yaitu sebesar Rp 64.481.000 sehingga total nilai BMN Gabungan adalah sebesar Rp 156.145.708.441.

3. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang (CRB) menguraikan secara rinci nilai BMN per perkiraan neraca, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan untuk masing-masing perkiraan. Dalam CRB ini diungkapkan pula kejadian penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan serta informasi tambahan yang diperlukan.

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)
PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

Sistem Informasi (SI) memegang peranan yang penting dalam upaya mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) sebagaimana yang telah dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai sektor privat. Pemerintah berupaya menyelaraskan layanan publik dan kemajuan teknologi dalam bentuk penerapan layanan elektronik atau *e-government*. Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat penggunaan sistem manual atau sistem yang terpisah-pisah dalam pengelolaan anggaran dan proses akuntansinya. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi ketidakandalan dan keterlambatan data pendapatan dan belanja dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaporan anggaran serta pengendalian belanja yang berdampak buruk pada pengelolaan anggaran secara keseluruhan.

Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk mewujudkannya, diperlukan sistem informasi yang andal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang andal. Sebagai suatu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Kementerian Keuangan, telah mengembangkan suatu sistem aplikasi terintegrasi yang diimplementasikan pada seluruh satuan kerja (satker) instansi pemerintah pusat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di seluruh Indonesia yang diberi nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

DJPB Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengembangan SAKTI harus menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama dalam inisiatif strategis. Apalagi dalam tahap piloting awal masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fitur aplikasi yang rumit (*unsimplicity*) karena dinilai terlalu canggih, sinyal internet yang tidak stabil, belum bisa menampilkan laporan secara utuh, minimnya pelatihan teknis, kurangnya komunikasi antar admin dengan operator, baik pusat dan daerah serta masalah-masalah lainnya.

Namun seiring waktu berjalan penyempurnaan aplikasi SAKTI yang telah *roll out* secara bertahap oleh beberapa K/L dan pada tahun 2023 adalah tahun kedua aplikasi tersebut telah secara resmi dipergunakan di setiap K/L. Di beberapa K/L yang memiliki satuan kerja yang banyak memang masih terdapat kendala karena proses migrasi saldo awal tidak berjalan dengan sukses, karena data yang tertinggal, atau ada data aset yang tidak terbawa karena kekhususannya, semoga ke depan menjadi perhatian dan dapat diatasi secara cepat dan baik oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPB. Migrasi saldo awal Setjen Wantannas berjalan dengan baik tanpa kendala, baik modul persediaan maupun modul aset sehingga proses transaksi pengelolaan BMN tidak menemui kendala yang berarti, dan semoga laporan di waktu mendatang SAKTI sukses mengintegrasikan seluruh pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional atau Setjen Wantannas adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selalu Ketua Dewan Ketahanan Nasional.

Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Setjen Wantannas dalam hal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Setjen Wantannas mempunyai fungsi:

- a. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- b. perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan, kesatuan, kelangsungan hidup bangsa dan negara.

- c. penyusunan perkiraan resiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

C. Periode Pelaporan

Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2023 ini disusun pada periode pertengahan tahun 2023 atau tepatnya pada periode tanggal 30 bulan Juni tahun 2023.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Mengacu pada pasal 1 ayat 24 PP Nomor 27 Tahun 2014, penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN/D ke dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya. Pengelola Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya;
2. Inventarisasi BMN adalah Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN;

3. Pelaporan adalah kegiatan dalam rangka melaporkan penatausahaan BMN. Kuasa Pengguna Barang menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menyusun LBPS dan LBPT sebagai bahan menyusun Neraca K/L untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBMN sebagai *output* utama penatausahaan, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh pengguna/pengelola barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) terkait BMN. LBMN juga merupakan bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh karena itu kebijakan akuntansi BMN mengacu pada lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang merupakan prinsip-prinsip dasar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang berlaku umum.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan LBMN harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dipahami. Laporan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas LBMN sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman penggolongan dan kodifikasi barang

Penggolongan dan kodifikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodifikasi BMN yang seragam dan

diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBMN dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun antar entitas pelaporan, yaitu K/L sebagai pengguna barang. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi BMN juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem panatausahaan BMN.

Dalam PMK Nomor 29/PMK.06/2010 diatur pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi masing-masing BMN. Selain itu, dalam rangka harmonisasi penyajian nilai BMN dalam penyusunan Neraca BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kodefikasi BMN diselaraskan dengan Bagan Akun Standar.

Sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang.

Pelaporan BMN pada tingkat kuasa pengguna barang (satuan kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang, sampai dengan tingkat subsub kelompok barang. Sedangkan pelaporan BMN pada tingkat wilayah dan/ atau Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pengguna barang (K/L) laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Salah satu tujuan penyusunan laporan BMN adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN, dalam hal ini, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi dan menghasilkan penyajian BMN dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan Mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e) Aset Tetap Lainnya, dan
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud, Aset Kemitraan, dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-Lain. Aset Tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam LBMN hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset lainnya dalam LKPP dan LKKL, yang meliputi penyajian BMN dari non BMN seperti piutang K/L yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (*restricted asset*), dan lain sebagainya.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp.25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1 atau lebih; Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Rekonsiliasi nilai BMN

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan rekonsiliasi internal bendahara Umum Negara, yang dilakukan secara berjenjang.

5. Penyusutan BMN

Dalam konteks Barang Milik Negara dikenal dengan nama penyusutan dan amortisasi. Penyusutan berlaku untuk pada Aset tetap. Adapun Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan amortisasi berlaku pada Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud yaitu alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna (LBP) Setjen Wantannas Semester I Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan di lingkungan Setjen Wantannas. LBP ini disusun dari LBP yang dihasilkan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah diterapkan. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada LBP ini adalah sebesar Rp. 161.474.284.600 dengan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 161.444.384.600 dan nilai mutasi yang terjadi selama satu tahun sebesar Rp. 29.900.000. Selanjutnya nilai penyusutan BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) pada semester I Tahun 2023 sebesar Rp. 156.231.362.706.

Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;

11. Laporan BPYBDS;
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara; dan
13. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN.

Penyajian BMN berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN disusun dengan klasifikasi golongan, bidang, dan kelompok BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.6/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Sedangkan penyajian BMN berdasarkan akun Neraca meliputi nilai BMN yang dalam pencatatannya telah memenuhi persyaratan kapitalisasi (intrakomptabel) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Sementara kepada BMN yang tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi dinyatakan sebagai BMN ekstrakomptabel. Penyajian BMN pada neraca didasarkan pada klasifikasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.

Nilai BMN per 30 Juni 2023 merupakan penjumlahan nilai BMN per 1 Januari 2023 dan nilai mutasi BMN selama kurun waktu 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. LBP Setjen Wantannas Semester I Tahun 2023 menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik intrakomptabel maupun ekstrakomptabel berdasarkan akun neraca. Setjen Wantannas sebagai bagian dari K/L melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan anggaran belanja negara yang dapat disajikan dalam laporan keuangan, yang salah satunya dibelanjakan dalam akun persediaan dan akun belanja modal. Secara umum di Semester I Tahun 2023 untuk anggaran belanja persediaan dan belanja modal Setjen Wantannas senilai Rp 1.408.750.000,- (Satu miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2023 adalah Rp 492.200.850,- (Empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau dengan persentase sebesar 34,94%.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 30 JUNI 2023

1. Saldo Awal BMN Tahun 2023

Nilai BMN Setjen Wantannas per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp 161.444.384.600 (Seratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp 161.378.058.600 (Seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 66.326.000 (Enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya nilai saldo awal penyusutan BMN per 1 Januari 2023 sejumlah Rp 155.319.004.269 (Seratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari penyusutan intrakomptabel sebesar Rp 155.253.229.269 (Seratus lima puluh lima miliar dua ratus

lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dan penyusutan ekstrakomptabel sebesar Rp 65.775.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Ringkasan Mutasi BMN Semester I Tahun 2023

Mutasi BMN per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada LBP Tahunan per 30 Juni 2023 sebesar Rp 5.591.070 (Lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 531.690 (Lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp 5.059.380 (Lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per
				531.690
1	Januari	90.348.450	89.964.390	915.750
2	Februari	91.291.950	91.483.980	915.750
3	Maret	45.166.300	45.659.140	230.880
4	April	140.356.050	137.879.640	2.707.290
5	Mei	95.138.100	97.288.170	557.220
6	Juni	99.416.040	99.517.050	456.210
	Total			5.591.070

b. Tanah

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sampai dengan periode laporan 30 Juni Tahun 2023 tidak memiliki tanah (0 rupiah).

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 156.081.227.441 (Seratus lima puluh enam miliar delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), dengan nilai per kelompok sebagai berikut:

1) Alat Angkut Darat Bermotor

Nilai Aset Alat Angkut Darat Bermotor per 30 Juni 2023 terdiri atas 52 Unit Sedan, 5 Unit Jeep, 5 unit Micro Bus, 24 unit mini bus, 1 unit Pick up/Mobil Box, 1 unit Mobil Ambulance dan 37 unit Sepeda motor sehingga total keseluruhan Alat Angkut Darat Bermotor sebanyak 125 unit dengan nilai aset sebesar Rp. 27.851.826.065 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam puluh lima rupiah).

2) **Alat Angkut Darat tak Bermotor**

Saldo Alat Angkut Darat Tak Bermotor sebanyak 6 unit dengan nilai aset sebesar Rp. 6.674.973 (Enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Pada semester I Tahun 2023 tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang dikarenakan tidak ada pembelian maupun penghapusan.

3) **Alat Bengkel Tak Bermesin**

Saldo Alat Bengkel Tak Bermesin per 30 Juni 2023 sebanyak 7 buah dengan nilai sebesar Rp. 11.924.219 (Sebelas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah). Pada Semester I tahun 2023 tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang dikarenakan untuk Alat Bengkel Tak Bermesin tidak ada pembelian maupun penghapusan.

4) **Alat Kantor**

Saldo awal Alat Kantor sebanyak 620 buah sebesar Rp. 15.018.276.491 (Lima belas miliar delapan belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). Pada semester I tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang dikarenakan untuk Alat Kantor tidak ada pembelian maupun penghapusan.

5) **Alat Rumah Tangga**

Saldo awal Alat Rumah Tangga sebanyak 1567 buah senilai Rp. 23.461.058.773 (Dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). Pada semester I tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang dikarenakan untuk Alat Rumah Tangga tidak ada pembelian maupun penghapusan.

6) **Alat Studio**

Saldo awal Alat Studio sejumlah 231 dengan nilai sebesar Rp 12.453.451.727 (Dua belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Pada semester I tahun 2023 mengalami mutasi tambah sejumlah 2 dengan nilai sebesar Rp 29.900.000 (Dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak terdapat mutasi kurang. Berdasarkan uraian diatas, maka saldo Alat Studio per 30 Juni 2023 sebanyak 233 buah sebesar Rp. 12.483.351.727 (Dua belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

7) **Alat Komunikasi**

Saldo awal Alat Komunikasi sebanyak 112 buah sejumlah Rp. 1.007.125.070 (Satu miliar tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh puluh rupiah). Pada semester I tahun 2023 tidak mengalami mutasi tambah maupun kurang.

8) **Peralatan Pemancar**

Saldo awal Peralatan Pemancar adalah sebanyak 2 buah dengan nilai sebesar Rp 1.957.253.998 (Satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dimana pada semester I tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

9) Alat Kedokteran

Saldo Alat Kedokteran per 30 Juni 2023 sebanyak 37 dengan nilai sebesar Rp 143.835.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

10) Unit Alat Laboratorium

Saldo Unit Alat Laboratorium per 30 Juni 2023 sebanyak 4 unit dengan nilai Rp. 580.888.932 (Lima ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

11) Peralatan Laboratorium Hydrodinamika

Saldo Peralatan Laboratorium Hydrodinamika per 30 Juni 2023 sebanyak 1 buah berupa Wireless Data Transmission System dengan nilai sebesar Rp. 1.899.710.174 (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

12) Alat Khusus Kepolisian

Saldo Alat Khusus Kepolisian pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 sebanyak 1 buah berupa baterai camera dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah).

13) Komputer Unit

Saldo awal Komputer Unit sebanyak 500 buah dengan nilai sebesar Rp. 11.391.832.402 (Sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua rupiah).

14) Peralatan Komputer

Saldo awal Peralatan Komputer sejumlah 417 buah dengan nilai sebesar Rp. 60.251.369.617 (Enam puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

15) Peralatan Olah Raga

Saldo Peralatan Olah Raga per 30 Juni 2023 sejumlah 1 buah dengan nilai sebesar Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah).

Sehingga dari uraian diatas, mutasi tambah pada bidang peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dapat digambarkan pada tabel berikut:

No	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
1	Pembelian	29.900.000	
2	Reklasifikasi Masuk		

Sementara itu mutasi kurang pada bidang peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 adalah nihil.

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 568.097.704 (Lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan Tercetak

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 berjumlah 3022 buah dengan nilai sebesar Rp. 565.258.004 (Lima ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat rupiah);

2) Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro

Saldo Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 berjumlah 4 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.320.000 (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

3) Kartografi, Naskah dan Lukisan

Saldo Kartografi, Naskah dan Lukisan pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 dengan jumlah 5 buah dengan nilai sebesar Rp. 1.519.700 (Satu juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

h. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah

Saldo awal Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah sejumlah 84 buah dengan nilai sebesar Rp. 4.758.633.455 (Empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah). Pada tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Alat Angkutan Darat Bermotor

Saldo awal Alat Angkutan Darat Bermotor berjumlah 2 buah sebesar Rp. 33.851.000 (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah). Pada semester I tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah dan kurang.

2) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Saldo awal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor adalah 3 buah. Pada semester I tahun 2023 tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang.

3) Alat Kantor

Saldo awal Alat Kantor sejumlah 5 buah sebesar Rp 346.681.178 (Tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah). Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang selama semester I tahun 2023.

4) Alat Rumah Tangga

Saldo awal Alat Rumah Tangga sejumlah 37 buah dengan nilai sebesar Rp 489.073.076 (Empat ratus delapan puluh sembilan juta). Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang selama semester I tahun 2023.

5) Alat Studio

Saldo awal Alat Studio sejumlah 1 buah dengan nilai sebesar Rp 215.622.233 (Dua ratus lima belas juta enam ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang selama semester I tahun 2023.

6) Komputer Unit

Saldo Komputer Unit sebanyak 27 unit dengan nilai Rp 353.910.006 (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu enam rupiah). Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang selama semester I tahun 2023.

7) Peralatan Komputer

Saldo awal Peralatan Komputer sebanyak 9 dengan nilai sebesar Rp Rp 3.315.551.660 (Tiga miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah). Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang selama semester I tahun 2023.

i. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0 (Nol rupiah).

j. Aset Tak Berwujud

Saldo Akhir Aset tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 112.502.691.420,- (Seratus dua belas miliar lima ratus dua juta enam ratus sembilan puluh satu empat ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Software

Saldo awal Software sebesar Rp. 6.156.748.248,- (Enam miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh

delapan rupiah) dengan jumlah sebanyak 6 buah. Tidak ada penambahan mutasi maupun pengurangan dalam kurun waktu semester I Tahun 2023.

2) Lisensi

Saldo awal Lisensi sebesar Rp. 0 (nol rupiah) dengan jumlah sebanyak 0 buah. Tidak ada penambahan mutasi maupun pengurangan dalam kurun waktu semester I Tahun 2023.

3) Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah

Saldo awal Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah sejumlah 367 buah dengan nilai sebesar Rp. 112.139.029.664 (Seratus dua belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Terdapat mutasi pengurangan sejumlah 323 buah dengan nilai sebesar Rp. 5.793.086.492 (Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Sehingga saldo per 30 Juni 2023 sejumlah 44 buah dengan nilai sebesar Rp. 106.345.943.172 (Seratus enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

k. Aset Tetap Bersejarah

Tidak terdapat aset tetap bersejarah yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

3. Barang Milik Negara pada LBP Setjen Wantannas Per 30 Juni 2023

a. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada LBP per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 15.622.053.961 (Lima belas miliar enam ratus dua puluh dua juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan neraca dengan rincian sebagai berikut;

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
1	Persediaan	456.210		456.210
2	Peralatan dan Mesin	156.081.227.441	64.481.000	156.145.708.441
3	Aset Tak Berwujud	6.156.748.248		6.156.748.248
4	Aset Tetap Lainnya	568.097.704		568.097.704
5	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4.758.633.455	1.845.000	4.760.478.455

6	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	106.345.943.172		106.345.943.172
---	---	-----------------	--	-----------------

Selanjutnya nilai akumulasi penyusutan BMN dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(151,409,722,766)	(64,040,200)	(151.473.762.966)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6,131,688,998)	0	(6,131,688,998)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(4,755,754,740)	(1.845.000)	(4.757.599.740)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(98,263,510,611)	0	(98,263,510,611)

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	456.210	456.210	0
2	Peralatan dan Mesin	156.081.227.441	156.081.227.441	0
3	Aset Tetap Lainnya	568.097.704	568.097.704	0
4	Aset Tak Berwujud	6.156.748.248	6.156.748.248	0
5	Aset Lain-lain*)	111.104.576.627	111.104.576.627	0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

V. INFORMASI LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

Periode Pelaporan	Nilai BMN	Perkembangan	
		Rupiah	Persen
2019	97.339.605.245	(57.251.320.016)	- 37.03 %
2020	53.020.018.030	(44.319.587.215)	- 45.53%
2021	20.329.078.889	(32.690.939.141)	- 38,34%
2022	15.622.053.961	(4.707.024.928)	- 76,84%
2023	13.350.429.115	(2.271.624.846)	- 85,45%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya per tanggal 30 Juni 2023 secara adalah sebagai berikut:

Jenis BMN	Jumlah NUP	Nilai Perolehan
Alat Angkutan Bermotor	114	26.378.188.020
Aset Tak Berwujud	47	112.384.280.770
Peralatan dan Mesin Khusus TIK	91	60.075.940.429
Peralatan dan Mesin Non TIK	840	43.079.608.294
Jumlah	1.092	241.918.017.513

Sementara itu nilai BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya per tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis BMN	Jumlah NUP	Nilai Perolehan
Alat Angkutan Bermotor	13	1.507.489.045
Aset Tak Berwujud	3	118.410.650
Aset Tetap Lainnya	3.031	568.097.704

Peralatan dan Mesin Khusus TIK	905	15.952.903.656
Peralatan dan Mesin Non TIK	2.237	15.558.775.568
Jumlah	6.189	33.705.676.623

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna Barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindaklanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	1	1

7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima	0	0	0	0	0

c. Pengelolaan BMN *Idle*

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 Setjen Wantannas tidak mempunyai BMN *Idle*.

3. BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 Setjen Wantannas tidak memiliki dana dekonsentrasi dan dana tugas perbantuan.

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 Setjen Wantannas tidak memiliki Badan Layanan Umum.

5. BMN dari Dana Belanja Lain-Lain

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 Setjen Wantannas tidak memiliki Dana Belanja Lain-lain.

6. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang.

a. BMN yang telah diajukan penjualannya

Pada semester I tahun 2023 belum ada pengajuan penjualan BMN ke Pengelola Barang.

b. Asuransi Barang Milik Negara

Sampai dengan semester I tahun 2023, Setjen Wantannas telah mengasuransikan BMN berupa Gedung yang beralamat di Ir. H. Juanda selama 11 bulan dengan besaran premi sejumlah Rp. 13.077.586 dengan nomor polis 204.235.110.23.00048/000/000.

c. Permasalahan terkait Penatausahaan BMN

1) Rasa memiliki atas penggunaan BMN di lingkungan Setjen Wantannas belum sepenuhnya baik, perlu dilakukan sosialisasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan BMN secara baik dan benar;

2) Kurangnya jumlah SDM pada unit kerja yang mengelola BMN di Setjen Wantannas sehingga masih diperlukan SDM baru agar pengelolaan BMN lebih optimal.

d. Temuan BPK dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022:

No	T.A.	Temuan BPK	Nilai	Tindak Lanjut
1	2019	<p>1. Belanja Jasa Lainnya (Belanja Jasa) yang digunakan untuk Belanja Aset Tidak Berwujud</p> <p>2. Belanja barang non operasional yang digunakan untuk belanja persediaan berupa atk.</p>	<p>Rp 16.000.000</p> <p>Rp 92.115.150</p>	<p>1. Surat Kepala Biro PSP kepada PPK Nomor: R - 22/PI.04.03/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal teguran atas kesalahan penganggaran belanja barang yang berisi agar lebih intensif melakukan pengendalian atas alokasi belanja barang dengan mempedomani ketentuan dan tata cara pelaksanaan APBN;</p> <p>2. Surat Kepala Biro PSP kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum Biro Umum Nomor: R - 23/PI.04.03/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal teguran atas kesalahan penganggaran belanja barang yang berisi agar lebih cermat dan disiplin dalam melaksanakan anggaran belanja barang dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. Surat Kepala Biro PSP kepada Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan Nomor: R - 24/PI.04.03/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal teguran atas kesalahan penganggaran belanja barang yang berisi agar lebih cermat dan disiplin dalam melaksanakan anggaran belanja</p>

No	T.A.	Temuan BPK	Nilai	Tindak Lanjut
				<p>barang dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;</p> <p>4. Surat Kepala Biro PSP kepada Bendahara Setjen Wantanas Nomor: R - 34/PI.04.03/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal teguran atas kesalahan penganggaran belanja barang yang berisi agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pelaksanaan anggaran belanja barang dengan mempedomani ketentuan tata cara pelaksanaan APBN.</p>
2	2020	Nihil	Nihil	Nihil
3	2021	Nihil	Nihil	Nihil
4	2022	Nihil	Nihil	Nihil

Jakarta, 27 Juli 2023

Kuasa Pengguna Barang,

Supendi, ST, M.Tr. Opsla
Laksamana Pertama TNI

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 04/PL.02.05/07/2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Enang Suhendar, S.Kom
NIP : 198105262009011002
Jabatan : Analis Barang Milik Negara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab akuntansi barang pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- Nama : Eka Puji Astuti, A.Md
NIP : 198402072006042002
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 052.01.0100.427975.000.KP dengan cara membandingkan data BMN pada LBP/KP dan LKK/L untuk periode semester I Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Rekonsiliasi Data:

NO	AKUN NERACA		NILAI BMN SEMESTER I TAHUN 2023		
			Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)		(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
	Posisi BMN Neraca				
	A	ASET LANCAR	531.690	(75.480)	456.210
	1	Barang Konsumsi	531.690	(142.080)	389.610
	2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	66.600	66.600
	B	ASET TETAP	6.114.279.759	(874.677.380)	5.239.602.379
	1	Tanah	0	0	0
	2	Peralatan dan Mesin	156.051.327.441	29.900.000	156.081.227.441
	3	Aset Tetap Lainnya	568.097.704	0	568.097.704
	4	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(150.505.145.386)	(904.577.380)	(151.409.722.766)
	C	ASET LAINNYA	9.506.691.512	(1.396.320.986)	8.110.370.526
	1	Aset Tak Berwujud (Software)	6.156.748.248	0	6.156.748.248
	2	Aset Tak Berwujud (Lisensi)	0	0	0
	3	Aset Tetap yg tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4.758.633.455	0	4.758.633.455
	4	Aset Tak Berwujud yg tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	112.139.029.664	(5.793.086.492)	106.345.943.172
	5	Akum. Amortisasi Software	(6.119.159.373)	(12.529.625)	-6.131.688.998
	6	Akum. Amortisasi Lisensi	0	0	0
	7	Akum. Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	(102.680.476.599)	4.416.965.988	(98.263.510.611)
	8	Akum. Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	(4.748.083.883)	(7.670.857)	(4.755.754.740)
	TOTAL		15.621.502.961	(2.271.073.846)	13.350.429.115

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP semester I Tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Analisis BMN

Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda

Enang Suhendar, S.Kom
NIP. 198105262009011002

Eka Puji Astuti, A.Md
NIP. 198402072006042002

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
UAKPB : 427975 SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tgl.Data : 26/07/23 6:00 AM
Tgl.Cetak : 26/07/23 9:02 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	389,610
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	66,600
132111	Peralatan dan Mesin	156,081,227,441
135121	Aset Tetap Lainnya	568,097,704
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(151,409,722,766)
162151	Software	6,156,748,248
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4,758,633,455
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	106,345,943,172
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(4,755,754,740)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6,131,688,998)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(98,263,510,611)
J U M L A H		13,350,429,115

JAKARTA, 31 Desember 2022
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
LAKSAMANA PERTAMA TNI

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/07/23 7:53 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker

UAPB : 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
UAKPB : 427975 SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		3,631	156,051,327,441	2	29,900,000	0	0	3,633	156,081,227,441
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	125	27,851,826,065	0	0	0	0	125	27,851,826,065
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	6	6,674,973	0	0	0	0	6	6,674,973
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	7	11,924,219	0	0	0	0	7	11,924,219
30501	ALAT KANTOR	-	620	15,018,276,491	0	0	0	0	620	15,018,276,491
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,567	23,461,058,773	0	0	0	0	1,567	23,461,058,773
30601	ALAT STUDIO	-	231	12,453,451,727	2	29,900,000	0	0	233	12,483,351,727
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	112	1,007,125,070	0	0	0	0	112	1,007,125,070
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	1,957,253,998	0	0	0	0	2	1,957,253,998
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	37	143,835,000	0	0	0	0	37	143,835,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	4	580,888,932	0	0	0	0	4	580,888,932
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	1,899,710,174	0	0	0	0	1	1,899,710,174
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	500	11,391,832,402	0	0	0	0	500	11,391,832,402
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	417	60,251,369,617	0	0	0	0	417	60,251,369,617
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	15,000,000	0	0	0	0	1	15,000,000
135121	Aset Tetap Lainnya		3,031	568,097,704	0	0	0	0	3,031	568,097,704
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3,022	565,258,004	0	0	0	0	3,022	565,258,004
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	4	1,320,000	0	0	0	0	4	1,320,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	5	1,519,700	0	0	0	0	5	1,519,700
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		84	4,758,633,455	0	0	0	0	84	4,758,633,455
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	33,851,000	0	0	0	0	2	33,851,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	3,944,302	0	0	0	0	3	3,944,302
30501	ALAT KANTOR	-	5	346,681,178	0	0	0	0	5	346,681,178
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	37	489,073,076	0	0	0	0	37	489,073,076
30601	ALAT STUDIO	-	1	215,622,233	0	0	0	0	1	215,622,233
31001	KOMPUTER UNIT	-	27	353,910,006	0	0	0	0	27	353,910,006
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	9	3,315,551,660	0	0	0	0	9	3,315,551,660
TOTAL				161,378,058,600		29,900,000		0		161,407,958,600

JAKARTA, 31 Desember 2022
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
LAKSAMANA PERTAMA TNI

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 052
UAKPB : 427975

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 27/07/23 7:54 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		258	64,481,000	0	0	0	0	258	64,481,000
30501	ALAT KANTOR	-	200	50,434,800	0	0	0	0	200	50,434,800
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	50	12,074,200	0	0	0	0	50	12,074,200
30601	ALAT STUDIO	-	2	1,102,000	0	0	0	0	2	1,102,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	870,000	0	0	0	0	6	870,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		9	1,845,000	0	0	0	0	9	1,845,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	9	1,845,000	0	0	0	0	9	1,845,000
TOTAL				66,326,000		0		0		66,326,000

JAKARTA, 31 Desember 2022

Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
LAKSAMANA PERTAMA TNI

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 27/07/23 7:55 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_satker

UAPB : 052
UAKPB : 427975

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		3,889	156,115,808,441	2	29,900,000	0	0	3,891	156,145,708,441
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	125	27,851,826,065	0	0	0	0	125	27,851,826,065
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	6	6,674,973	0	0	0	0	6	6,674,973
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	7	11,924,219	0	0	0	0	7	11,924,219
30501	ALAT KANTOR	-	820	15,068,711,291	0	0	0	0	820	15,068,711,291
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,617	23,473,132,973	0	0	0	0	1,617	23,473,132,973
30601	ALAT STUDIO	-	233	12,454,553,727	2	29,900,000	0	0	235	12,484,453,727
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	118	1,007,995,070	0	0	0	0	118	1,007,995,070
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	1,957,253,998	0	0	0	0	2	1,957,253,998
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	37	143,835,000	0	0	0	0	37	143,835,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	4	580,888,932	0	0	0	0	4	580,888,932
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	1,899,710,174	0	0	0	0	1	1,899,710,174
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	1,100,000	0	0	0	0	1	1,100,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	500	11,391,832,402	0	0	0	0	500	11,391,832,402
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	417	60,251,369,617	0	0	0	0	417	60,251,369,617
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	15,000,000	0	0	0	0	1	15,000,000
135121	Aset Tetap Lainnya		3,031	568,097,704	0	0	0	0	3,031	568,097,704
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3,022	565,258,004	0	0	0	0	3,022	565,258,004
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	4	1,320,000	0	0	0	0	4	1,320,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	5	1,519,700	0	0	0	0	5	1,519,700
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		93	4,760,478,455	0	0	0	0	93	4,760,478,455
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	33,851,000	0	0	0	0	2	33,851,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	3,944,302	0	0	0	0	3	3,944,302
30501	ALAT KANTOR	-	5	346,681,178	0	0	0	0	5	346,681,178
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	37	489,073,076	0	0	0	0	37	489,073,076
30601	ALAT STUDIO	-	1	215,622,233	0	0	0	0	1	215,622,233
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	9	1,845,000	0	0	0	0	9	1,845,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	27	353,910,006	0	0	0	0	27	353,910,006
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	9	3,315,551,660	0	0	0	0	9	3,315,551,660
TOTAL				161,444,384,600		29,900,000		0		161,474,284,600

JAKARTA, 31 Desember 2022
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
LAKSAMANA PERTAMA TNI

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 052
UAKPB : 427975

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tgl Data : 26/07/23 6:00 AM
Tanggal : 26/07/23 9:19 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2023	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 052
UAKPB : 427975

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tgl Data : 26/07/23 6:00 AM
Tanggal : 26/07/23 9:27 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2023	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		6	6,156,748,248	0	0	0	0	6	6,156,748,248
8010101001	Software Komputer	dummy	6	6,156,748,248	0	0	0	0	6	6,156,748,248
162161	Lisensi		0	0	0	0	0	0	0	0
8010101002	Lisensi	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		367	112,139,029,664	0	0	323	5,793,086,492	44	106,345,943,172
8010101001	Software Komputer	dummy	240	84,423,570,144	0	0	203	5,743,412,662	37	78,680,157,482
8010101002	Lisensi	dummy	127	27,715,459,520	0	0	120	49,673,830	7	27,665,785,690
TOTAL				118,295,777,912		0		5,793,086,492		112,502,691,420

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

NAMA UAKPB : SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
KODE UAKPB : 427975

TANGGAL : 26-07-2023
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 26 JULI 2023
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
NIP. LAKSAMANA PERTAMA TNI

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

NAMA UAKPB : SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
KODE UAKPB : 427975

TANGGAL : 26-07-2023
Kode LAP : daftar_bmn_dbh
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
1	3.02.01.04.001	36	Sepeda Motor	HONDA	-	28-11-2017	0
JUMLAH							0

JAKARTA, 26 JULI 2023
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
NIP. LAKSAMANA PERTAMA TNI

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 052
UAKPB : 427975

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tgl Data : 26/07/23 6:00 AM

Tanggal : 26/07/23 9:28 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2023
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

NAMA UAKPB : SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
KODE UAKPB : 427975

TANGGAL : 26-07-2023
Kode LAP : daftar_bmn_bpyb
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 26 JULI 2023
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
NIP. LAKSAMANA PERTAMA TNI

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

NAMA UAKPB : SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL
KODE UAKPB : 427975

TANGGAL : 26-07-2023
Kode LAP : daftar_bmn_dbr
HALAMAN: 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 26 JULI 2023
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
NIP. LAKSAMANA PERTAMA TNI

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
UAKPB : 427975 SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/07/23 8:03 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		3,633	156,081,227,441	(150,505,145,386)	(904,577,380)	0	(151,409,722,766)	4,671,504,675
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	125	27,851,826,065	(25,734,567,533)	(440,088,781)	0	(26,174,656,314)	1,677,169,751
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	6	6,674,973	(6,674,973)	0	0	(6,674,973)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	7	11,924,219	(11,924,219)	0	0	(11,924,219)	0
30501	ALAT KANTOR	-	620	15,018,276,491	(15,012,396,491)	(840,000)	0	(15,013,236,491)	5,040,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,567	23,461,058,773	(23,177,812,573)	(39,268,800)	0	(23,217,081,373)	243,977,400
30601	ALAT STUDIO	-	233	12,483,351,727	(12,301,849,277)	(22,487,950)	0	(12,324,337,227)	159,014,500
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	112	1,007,125,070	(1,007,125,070)	0	0	(1,007,125,070)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	2	1,957,253,998	(1,292,727,700)	(97,862,700)	0	(1,390,590,400)	566,663,598
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	37	143,835,000	(121,065,400)	(3,252,800)	0	(124,318,200)	19,516,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	4	580,888,932	(471,972,260)	(36,305,556)	0	(508,277,816)	72,611,116
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	1,899,710,174	(823,207,742)	(63,323,672)	0	(886,531,414)	1,013,178,760
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	1	1,100,000	(687,500)	(137,500)	0	(825,000)	275,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	500	11,391,832,402	(10,406,583,652)	(179,321,250)	0	(10,585,904,902)	805,927,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	417	60,251,369,617	(60,121,550,996)	(21,688,371)	0	(60,143,239,367)	108,130,250
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	15,000,000	(15,000,000)	0	0	(15,000,000)	0
135121	Aset Tetap Lainnya		3,031	568,097,704	0	0	0	0	568,097,704
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	3,022	565,258,004	0	0	0	0	565,258,004
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	4	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	5	1,519,700	0	0	0	0	1,519,700
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		84	4,758,633,455	(4,748,083,883)	(7,670,857)	0	(4,755,754,740)	2,878,715
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	33,851,000	(29,532,928)	(1,439,357)	0	(30,972,285)	2,878,715
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	3,944,302	(3,944,302)	0	0	(3,944,302)	0
30501	ALAT KANTOR	-	5	346,681,178	(340,449,678)	(6,231,500)	0	(346,681,178)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	37	489,073,076	(489,073,076)	0	0	(489,073,076)	0
30601	ALAT STUDIO	-	1	215,622,233	(215,622,233)	0	0	(215,622,233)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	27	353,910,006	(353,910,006)	0	0	(353,910,006)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	9	3,315,551,660	(3,315,551,660)	0	0	(3,315,551,660)	0
JUMLAH			6,748	161,407,958,600	(155,253,229,269)	(912,248,237)	0	(156,165,477,506)	5,242,481,094

JAKARTA, 31 Desember 2022
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA
LAKSAMANA PERTAMA TNI

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
UAKPB : 427975 SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL

Tgl Data : 27/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 27/07/23 8:03 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		258	64,481,000	(63,930,000)	(110,200)	0	(64,040,200)	440,800
30501	ALAT KANTOR	-	200	50,434,800	(50,434,800)	0	0	(50,434,800)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	50	12,074,200	(12,074,200)	0	0	(12,074,200)	0
30601	ALAT STUDIO	-	2	1,102,000	(551,000)	(110,200)	0	(661,200)	440,800
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	870,000	(870,000)	0	0	(870,000)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan		9	1,845,000	(1,845,000)	0	0	(1,845,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	9	1,845,000	(1,845,000)	0	0	(1,845,000)	0
JUMLAH			267	66,326,000	(65,775,000)	(110,200)	0	(65,885,200)	440,800

JAKARTA, 31 Desember 2022

Penanggung Jawab UAKPB

KUASA PENGGUNA BARANG

SUPENDI, S.T., M.TR.OPSLA

LAKSAMANA PERTAMA TNI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710; CALL CENTER 150-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-82/KN/KN.2/2023 4 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2023

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) Semester I Tahun 2023 disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat tanggal 26 Juli tahun anggaran berjalan.
2. Terkait dengan penyusunan dan penyampaian LBP Semester I Tahun 2023 dan dengan memperhatikan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023, penyampaian LBP Semester I Tahun 2023 ditetapkan tanggal **31 Juli 2023**.
3. Berkenaan dengan penyusunan LBP Semester I Tahun 2023 dimaksud, maka guna menjaga keakuratan dan keandalan data BMN yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Neraca, diharapkan Kementerian/Lembaga untuk:
 - a. memastikan agar transaksi terkait penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) telah diinput seluruhnya dengan lengkap dan benar;
 - b. memastikan bahwa seluruh transaksi barang persediaan telah dibukukan sesuai dengan dokumen dukung dan telah dilakukan opname fisik sesuai ketentuan;
 - c. mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN secara internal antara unit akuntansi barang (UAKPB) dan unit akuntansi keuangan (UAKPA);
 - d. memanfaatkan dan menindaklanjuti menu *To Do List*, Monitoring, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan barang;
 - e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSAP 17 tentang Properti Investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 dengan:
 - 1) mengidentifikasi persetujuan pelaksanaan pemanfaatan BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang terkait kebijakan penyajian BMN sebagai Properti Investasi dalam Laporan Keuangan;
 - 2) melakukan penyajian BMN yang dilakukan pemanfaatan dan/atau BMN yang tidak digunakan dalam rangka tugas dan fungsi serta memenuhi kriteria Properti Investasi, sebagai Properti Investasi dalam Laporan Keuangan;
 - 3) melakukan pengawasan dan pengendalian atas BMN yang tersaji sebagai Properti Investasi terkait pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - 4) berkoordinasi dengan Pengelola Barang atas pelaksanaan penggunaan dan/atau pemanfaatan BMN yang disajikan sebagai Properti Investasi;

- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSAP 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 dengan:
 - 1) mengidentifikasi atas kerja sama yang dilakukan dengan pihak ke tiga, keterkaitannya dengan konsesi jasa;
 - 2) berkoordinasi dengan mitra pemanfaatan atas dokumentasi terkait pemanfaatan yang dilakukan dengan mitra; dan
 - 3) meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama yang dilakukan bersama mitra, serta penyajian yang diperlukan dalam laporan keuangan sesuai ketentuan; dan
 - g. melakukan identifikasi atas BMN yang memenuhi kriteria properti investasi dan BMN yang masuk ke dalam lingkup perjanjian konsesi jasa. Atas BMN yang teridentifikasi tersebut agar dibukukan ke dalam LBP dan Laporan Keuangan Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. LBP Semester I Tahun 2023 mohon agar disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui alamat email kedinasan lbnm.ditpkkn@kemenkeu.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan; dan
 - b. disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 5. Selanjutnya, dalam rangka memastikan bahwa data BMN telah disajikan secara benar dalam Laporan Keuangan dan sebagai bentuk pengendalian, akan dilakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN Semester I Tahun 2023 antara Pengguna Barang dan Pengelola Barang yang direncanakan akan dilaksanakan pada 24 s.d. 28 Juli 2023.

Demikian dapat kami sampaikan, dengan harapan LBP Semester I Tahun 2023 dapat kami terima tepat waktu serta disajikan secara lengkap sesuai rincian pada Lampiran II.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Encep Sudarwan

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Lampiran I Surat
Nomor : S-82/KN/KN.2/2023
Tanggal : 4 Juli 2023

Daftar Kementerian Negara/Lembaga

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
6. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia
9. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
12. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum & HAM
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
28. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / BAREKRAF
32. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
33. Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional
34. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM
35. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
36. Sekretaris Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi
37. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
38. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
39. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama BAPPENAS



42. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
43. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
45. Asisten Kapolri Bidang Logistik Kepolisian Negara RI
46. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48. Sekretaris Utama Kementerian Investasi/BKPM
49. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
51. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53. Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
57. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
58. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
60. Sekretaris Utama Arsip Nasional
61. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
62. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
63. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
64. Sekretaris Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
65. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
66. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
67. Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
68. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
69. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
70. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
71. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
72. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
73. Deputi Bidang Administrasi dan Perencanaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
74. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
75. Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet
76. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
77. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI
78. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
79. Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
80. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
81. Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
82. Kepala Biro Administrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
83. Direktur Jenderal Anggaran (BA 999.08)
ub. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Dokumen/Data Yang Harus Disampaikan

No.	Nama Dokumen/Data
LBP dan lampirannya	
1.	Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAPB dan UAPA
2.	Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2023
3.	Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
4.	Laporan Barang Persediaan
5.	Laporan Barang Intrakomptabel
6.	Laporan Barang Ekstrakomptabel
7.	Laporan Barang Gabungan
8.	Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan
9.	Laporan Aset Tak Berwujud
10.	Laporan Barang Bersejarah
11.	Laporan Barang Rusak Berat
12.	Laporan Barang Hilang
13.	Laporan Barang BPYBDS
14.	Laporan Barang Hibah DK/TP
15.	Laporan Penyusutan Intrakomptabel
16.	Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
17.	Laporan Amortisasi ATB
18.	Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) yang diantaranya memuat informasi mengenai pengungkapan Amortisasi BMN, KDP yang dilanjutkan/dihentikan, normalisasi dan koreksi penyusutan, tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2022
19.	Laporan PNBPN (yang bersumber dari pengelolaan BMN)
20.	Laporan Persediaan Tidak dikuasai
21.	Daftar Barang Rusak Berat Diusulkan ke Pengelola
Data tambahan	
1.	Neraca Percobaan Berbasis Akrual dan Laporan Neraca Tingkat K/L
2.	Data Transfer Masuk dan Transfer Keluar dan penjelasan selisihnya
3.	Data/Laporan Aset Konsesi Jasa
4.	Data/Laporan Aset Properti Investasi
5.	Data/Laporan Aset Sengketa
6.	Data/Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN

Catatan:

1. LBP Semester I Tahun 2023 yang disampaikan sudah termasuk:
 - a. BMN yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, serta Urusan Bersama;
 - b. BMN yang berada pada Badan Layanan Umum (BLU);
 - c. BMN yang diperoleh dari Bagian Anggaran 999.08.
2. Format Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) disesuaikan dengan format sebagaimana Lampiran VI PMK Nomor 181/PMK.06/2016.
3. Pengungkapan Amortisasi BMN pada CaLBMN disesuaikan dengan format sebagaimana Lampiran KMK Nomor 98/KM.6/2016.
4. Format LBP PNBPN (Yang Bersumber Dari Pengelolaan BMN) disesuaikan dengan format sebagaimana Lampiran VII PMK Nomor 181/PMK.06/2016
5. Pengungkapan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2022 pada CaLBMN sebagaimana Lampiran III.
6. Pengungkapan pengasuransian BMN sebagaimana Lampiran IV.



**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA ...
PERIODE...**

I. PENDAHULUAN

...

Sesuai PMK
181/PMK.6/2016

V. INFORMASI BMN LAINNYA

...

**VI. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022**

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Tahun 2022, terdapat/tidak terdapat* temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan, Aset tetap dan Aset tak Berwujud. Rincian tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga sebagaimana terlampir.

**REKAPITULASI TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2022
Pada Kementerian/Lembaga.....
Per 30 Juni 2023**

No.	Uraian Temuan	Tindak Lanjut

*Coret yang tidak perlu

